



BUPATI NGADA

PENGUMUMAN

NOMOR : 813/BKPSDM/18/10/2024

TENTANG

SELEKSI CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2024

Dalam rangka mengisi lowongan formasi Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngada Tahun 2024, maka Pemerintah Kabupaten Ngada membuka kesempatan bagi Masyarakat/Warga Negara Republik Indonesia yang berminat menjadi Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngada Formasi Tahun 2024.

I. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 329 Tahun 2024 Tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 329 Tahun 2024 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024, tanggal 2 Agustus 2024;
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 347 Tahun 2024 Tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 348 Tahun 2024 Tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah Tahun Anggaran 2024;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 349 Tahun 2024 Tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun Anggaran 2024;

II. Formasi

Formasi yang dibutuhkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 329 Tahun 2024 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024, sejumlah 1.105 (Seribu Seratus Lima), dengan rincian:

- | | |
|--------------------------------|------------------------|
| 1. Tenaga Fungsional Guru | : 205 (Dua Ratus Lima) |
| 2. Tenaga Fungsional Kesehatan | : 300 (Tiga Ratus) |
| 3. Tenaga Teknis | : 600 (Enam Ratus) |

III. Persyaratan Umum

- 1) Warga Negara Indonesia;
- 2) Usia Paling Rendah 20 (Dua Puluh) Tahun dan Paling Tinggi 1 (satu) Tahun sebelum BUP (Batas Usia Pensiun) pada jabatan yang akan dilamar pada saat melamar;
- 3) Calon Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) Formasi Jabatan di 1 (satu) Instansi;
- 4) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;

- 5) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Swasta;
- 6) Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, Calon PPPK, PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 7) Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
- 8) Memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan persyaratan jabatan;
- 9) Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
- 10) Setiap pelamar wajib memiliki pengalaman di bidang kerja sesuai kompetensi tugas jabatan yang dilamar pada saat pendaftaran dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Paling singkat 2 (dua) tahun pada jabatan pelaksana;
 - b. Paling singkat 2 (dua) tahun pada jabatan fungsional jenjang pemula, terampil dan ahli pertama;
 - c. Paling singkat 3 (tiga)) tahun pada jabatan fungsional jenjang ahli muda dibuktikan dengan Surat Keterangan Bekerja yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja;
- 11) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

IV. Kategori/Kriteria Pelamar

- A. Pelamaran Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja akan dilaksanakan 2 (dua) tahap, dengan rincian:
 - 1) Tahap 1
Diikuti oleh Pelamar Prioritas (Pelamar Prioritas Guru dan D-IV Bidang Pendidik Tahun 2023), Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II) dan Tenaga non ASN yang Terdata dalam Pangkalan Data (Database) BKN
 - 2) Tahap 2
Diikuti oleh Pelamar Tenaga non ASN yang Aktif Bekerja di Instansi Pemerintah (Termasuk Lulusan PPG untuk Formasi Guru di Instansi Daerah)
- B. Jabatan PPPK Guru
 - 1) Pelamar yang dapat melamar terdiri atas:
 - a. Pelamar prioritas
Yaitu peserta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK JF Guru di Instansi Daerah tahun 2021 dan sebelumnya belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi PPPK JG Guru periode sebelumnya;
 - b. Guru eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK - II)
Yaitu Pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara dan aktif mengajar di Instansi Pemerintah;
 - c. Guru non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) di Instansi Daerah terdiri atas :
 1. Pegawai yang terdaftar pada pangkalan data (database) tenaga Non – ASN pada BKN dan aktif bekerja pada Insatansi Pemerintah; atau
 2. Guru Non ASN di Sekolah Negeri yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan aktif mengajar paling sedikit 2 (Dua) tahun atau 4 (Empat) semester secara terus menerus di Instansi tempat mengajar saat mendaftar;
 - d. Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Pelamar pada angka 1)a,1)b dan 1)c hanya dapat melamar pada Instansi Pemerintah Tempat Mengajar saat mendaftar;

- 2) Dalam hal terdapat pelamar prioritas berasal dari Luar Instansi Pemerintah atau dari Sekolah Swasta dapat melamar di Instansi Pemerintah Kabupaten Ngada wajib memiliki surat izin untuk melamar pada seleksi PPPK JF Guru di Instansi Daerah tahun anggaran 2024 dari Kepala Instansi/Lembaga/Yayasan;
 - 3) Pelamar pada Seleksi JF Guru di Instansi Daerah Tahun 2024 wajib memiliki kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau Diploma Empat dan/atau Sertifikat Pendidik dengan merujuk pada Surat Edaran Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nomor: 1311/B.B1/HK.04.01/2024 tanggal 18 Maret 2024 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024;
- C. Jabatan Fungsional Kesehatan dan Teknis
- 1) Pelamar yang dapat melamar terdiri atas:
 - a. Pelamar Prioritas D-IV Bidan Pendidik TA. 2023;
 - b. Eks Tenaga Honorer Kategori II (Eks THK-II) yang aktif bekerja pada Instansi Pemerintah;
 - c. Tenaga Non Aparatur Sipil Negara (tenaga Non – ASN) yang aktif bekerja pada Instansi Pemerintah
 - 2) Tenaga Non Aparatur Sipil Negara (tenaga Non – ASN) terdiri atas:
 - a. Pegawai yang terdaftar pada pangkalan data (database) tenaga Non – ASN pada BKN dan aktif bekerja pada Instansi Pemerintah;
 - b. Pegawai yang aktif bekerja pada Instansi Pemerintah paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus menerus.
 - 3) Seluruh Pelamar baik Eks Tenaga Honorer Kategori II (Eks THK-II) maupun Tenaga Non Aparatur Sipil Negara (tenaga Non – ASN) wajib mengunggah surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja yang menyatakan bahwa pelamar masih aktif bekerja;
 - 4) Bagi Pegawai yang aktif bekerja pada Instansi Pemerintah wajib juga mencantumkan masa kerja minimal 2 (dua) tahun secara terus menerus;
 - 5) Dalam hal terdapat kebutuhan pada JF bidan kategori keahlian, kebutuhan jabatan tersebut dapat dilamar oleh pelamar DIV Bidan Pendidik Tahun 2023 yang dinyatakan lulus seleksi PPPK tahun 2023 dan hanya dapat melamar pada Instansi Pemerintah tempat bekerja saat mendaftar;
 - 6) Pelamar yang melamar pada kebutuhan jenis jabatan fungsional Kesehatan sesuai Kepmenpan RB Nomor 322 Tahun 2024 wajib mengunggah Surat Tanda Registrasi yang masih berlaku sampai saat mendaftar sesuai jabatan yang dilamar;
 - 7) Pelamar pada seleksi PPPK JF Kesehatan tahun anggaran 2024 wajib memiliki kualifikasi pendidikan sesuai persyaratan dengan merujuk pada Surat Edaran Dirjen Nakes No. PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan STR dalam rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024;
 - 8) Dalam pengadaan PPPK terdapat jenis jabatan fungsional yang memerlukan persyaratan wajib tambahan serta sertifikat kompetensi dan/atau ketentuan lain sebagai tambahan nilai seleksi kompetensi teknis sesuai Kepmenpan RB Nomor 391 tahun 2024;
 - 9) Bagi JF Dokter dengan sub jabatan Dokter Spesialis dan Dokter Sub Spesialis, pengalamam kerja dihitung sejak menempuh pendidikan Dokter Spesialis dan/atau Dokter Sub Spesialis.

D. Persyaratan Tambahan Pelamar Disabilitas

- a. Pelamar disabilitas wajib melampirkan Surat Keterangan dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasiannya;
- b. Menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang dilamar;
- c. Penyandang disabilitas tidak bisa melamar pada jabatan:
 - Penyandang Disabilitas Rungu tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF Guru Bahasa Indonesia atau JF Guru Bahasa Inggris;
 - Penyandang Disabilitas Daksa tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF Guru Pendidikan Jasmani, olahraga dan kesehatan;
 - Penyandang Disabilitas Netra tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF Guru Seni Budaya Keterampilan.

V. Tata Cara Pendaftaran

- 1) Pelamar membuat akun pada Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) melalui tautan <https://sscasn.bkn.go.id>. dengan memasukkan data diri dalam KTP berupa NIK, Nama, Tempat Tanggal Lahir dan Nomor Kartu Keluarga lalu mengikuti formulir petunjuk yang diberikan. Pelamar yang sudah memiliki akun pada SSCASN tahun anggaran sebelumnya tetap harus membuat akun pada SSCASN tahun anggaran 2024. Pelamar yang sebelumnya sudah memiliki akun SSCASN Tahun Anggaran 2024 dapat menggunakan akunnya kembali hanya jika belum melakukan pelamaran pada Seleksi ASN Tahun 2024, Buku Panduan Pendaftaran dapat dilihat pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
- 2) **Pelamar dapat mengecek status Pendataan non-asn pada link https://helpdesk-sscasn.bkn.go.id/cek_pegawai_non_asn;**
- 3) Setelah membuat akun, pelamar login menggunakan NIK dan Password yang sudah ditentukan.
- 4) Pelamar mengisi biodata terdiri dari data diri, nama dan tanggal lahir sesuai ijazah yang dimiliki, derajat disabilitas dan link video disabilitas (jika merupakan seorang disabilitas) serta data diri lainnya.
- 5) Pelamar memilih jenis pengadaan yang akan dilamar, apakah akan melamar PPPK Teknis (Fungsional dan Pelaksana), PPPK Kesehatan atau PPPK Guru.
- 6) Bagi pelamar yang masuk kategori THK-II, wajib mencantumkan Nomor Peserta Ujian THK-II Tahun 2013 setelah memilih jenis pengadaan. **Pelamar THK-II yang tidak memasukkan nomornya pada tahap ini tidak akan masuk kategori THK-II dan tidak akan mendapatkan prioritas khusus dalam pengolahan.**
- 7) Pelamar memilih kualifikasi pendidikan, jabatan dan unit kerja sesuai dengan yang ingin dilamar.
- 8) Pelamar mengisi data terkait pendidikan antara lain: nama kampus, prodi, nilai IPK, dan akreditasi.
- 9) Pelamar memilih lokasi ujian yang sesuai dengan domisili.
- 10) **Pelamar tidak bisa mengubah lokasi ujian setelah melamar.**
- 11) Untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada calon pendaftar dalam menyelesaikan persyaratan administrasi, maka pada pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) T.A. 2024 diperkenankan bagi calon pendaftar untuk menggunakan meterai elektronik (e-meterai) maupun meterai konvensional (tempel) pada dokumen unggahan Surat Lamaran maupun Surat Pernyataan Instansi, **Jika menggunakan Materai Konvensional tidak diperbolehkan menggunakan Materai yang sama untuk dokumen yang berbeda karena akan mengakibatkan Tidak Memenuhi Syarat (TMS);**

11) Pelamar mengunggah dokumen berikut:

- a. Pasfoto formal terbaru berlatar belakang warna merah;
- b. Kartu Tanda Penduduk/Surat Keterangan dari Dukcapil/Bukti Identitas Kependudukan lainnya;
- c. Surat Pernyataan lima poin yang sudah ditandatangani dan dibubuhi materai;
- d. Surat Lamaran sesuai dengan persyaratan instansi dan sudah ditandatangani dan dibubuhi materi;
- e. Ijazah asli, bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib melampirkan ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
- f. Transkrip/Daftar Nilai asli, bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib melampirkan konversi nilai IPK dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
- g. (Khusus PPPK Teknis dan Kesehatan) Surat keterangan bekerja yang ditandatangani pimpinan unit kerja, dengan pengalaman di bidang kerja paling singkat 2 (dua) tahun untuk pelamar jabatan pelaksana/fungsional terampil/pertama atau 3 (tiga) tahun untuk pelamar jabatan fungsional muda;
- h. (Khusus PPPK Teknis dan Kesehatan) Surat keterangan aktif bekerja pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar yang ditandatangani pimpinan unit kerja. **Bagi pelamar yang TIDAK terdaftar database Non ASN BKN, harus mencantumkan masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus menerus.**
- i. (Khusus PPPK Kesehatan) STR bagi tenaga kesehatan tertentu
- j. (Khusus PPPK Guru)
 - Bagi pelamar Kategori Prioritas yang tidak mendapatkan formasi pada rekrutmen sebelumnya dan/atau tidak dalam status aktif mengajar menurut data Dapodik, wajib mengunggah Surat Izin dari instansi (tujuan) Pemerintah Kabupaten Ngada;
 - Bagi pelamar prioritas yang statusnya aktif mengajar di Dapodik pada Sekolah Swasta, wajib mengunggah surat izin melamar PPPK dari Ketua Yayasan;
 - Bagi pelamar yang statusnya aktif mengajar di Dapodik pada Sekolah Negeri, wajib mengunggah surat keterangan Kepala Sekolah;
 - (Khusus Disabilitas) Surat keterangan menyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh dari rumah sakit pemerintah / puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya;

12) Pastikan dokumen yang terunggah adalah **hasil pindai/scan dokumen ASLI dan berwarna serta terbaca dengan baik dan jelas**, sesuai dengan format dan ukuran yang ditentukan SSCASN. Pastikan klik Lihat setelah unggah dokumen

13) Pelamar dihadapkan pada layar resume, pastikan data yang diisi sudah sesuai dan pastikan seluruh dokumen unggahan sudah sesuai. Jika sudah, pelamar dapat melakukan "AKHIRI PENDAFTARAN". **SETELAH AKHIRI PENDAFTARAN, SELURUH DATA DAN DOKUMEN YANG TERUNGGAH TIDAK BISA DIUBAH KEMBALI.**

VI. Jadwal Seleksi

Jadwal Seleksi Sesuai Surat Kepala BKN Nomor 6610/B-KS.04.01/SD/K/2024 tanggal 27 September 2024 tentang Jadwal Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024.

Lampiran I Surat Plt. Kepala Badan

Kepegawaian Negara

Nomor : 6610/B-KS.04.01/SD/K/2024

Tanggal : 27 September 2024

Jadwal Seleksi Pengadaan PPPK T.A. 2024 bagi Pelamar Prioritas (Pelamar Prioritas Guru dan D-IV Bidan Pendidik Tahun 2023), Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II) dan Tenaga non ASN yang Terdata dalam Pangkalan Data (*Database*) BKN

No	Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman Seleksi	30 September s.d. 19 Oktober 2024
2	Pendaftaran Seleksi	1 s.d. 20 Oktober 2024
3	Seleksi Administrasi	1 s.d. 29 Oktober 2024
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	30 Oktober s.d. 1 November 2024
5	Masa Sanggah (*)	2 s.d. 4 November 2024
6	Jawab Sanggah	2 s.d. 6 November 2024
7	Pengumuman Pasca Masa Sanggah (*)	5 s.d. 11 November 2024
8	Penarikan data final	12 s.d. 14 November 2024
9	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	15 s.d. 25 November 2024
10	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	26 November s.d. 1 Desember 2024
11	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	2 s.d. 19 Desember 2024
12	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	7 s.d. 23 Desember 2024
13	Pengumuman Hasil Kelulusan (**)	24 s.d.31 Desember 2024
14	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (***)	10 s.d. 21 Desember 2024

No	Kegiatan	Jadwal
15	Integrasi Nilai Seleksi Kompetensi dan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (***)	13 s.d. 28 Desember 2024
16	Pengumuman Hasil Kelulusan (***)	24 s.d. 31 Desember 2024
17	Pengisian DRH NI PPPK	1 s.d. 31 Januari 2025
18	Usul Penetapan NI PPPK	1 s.d. 28 Februari 2025

Keterangan:

- (*) : Sesuai dengan Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2024
- (**) : Instansi Tidak Melaksanakan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan
- (***) : Instansi Melaksanakan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan dan Mendapatkan Persetujuan Menteri PAN RB

Lampiran II Surat Plt. Kepala Badan
Kepegawaian Negara

Nomor : 6610/B-KS.04.01/SD/K/2024

Tanggal : 27 September 2024

Jadwal Seleksi Pengadaan PPPK T.A. 2024 bagi Pelamar Tenaga non ASN yang Aktif Bekerja di Instansi Pemerintah (Termasuk Lulusan PPG untuk Formasi Guru di Instansi Daerah)

No	Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman Seleksi	1 s.d. 30 November 2024
2	Pendaftaran Seleksi	17 November s.d. 31 Desember 2024
3	Seleksi Administrasi	16 Desember 2024 s.d. 3 Februari 2025
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	4 s.d. 18 Februari 2025
5	Masa Sanggah (*)	19 s.d. 21 Februari 2025
6	Jawab Sanggah	20 s.d. 27 Februari 2025
7	Pengumuman Pasca Masa Sanggah (*)	22 s.d. 28 Februari 2025
8	Penarikan data final	1 s.d. 7 Maret 2025
9	Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi	8 s.d. 23 Maret 2025
10	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	24 Maret s.d. 8 April 2025
11	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	9 s.d. 16 April 2025
12	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	17 April s.d. 16 Mei 2025
13	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	22 April s.d. 21 Mei 2025
14	Pengumuman Hasil Kelulusan (**)	22 s.d. 31 Mei 2025
15	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (***)	25 April s.d. 17 Mei 2025

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

No	Kegiatan	Jadwal
16	Integrasi Nilai Seleksi Kompetensi dan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (***)	30 April s.d. 22 Mei 2025
17	Pengumuman Hasil Kelulusan (***)	22 s.d. 31 Mei 2025
18	Pengisian DRH NI PPPK	1 s.d. 30 Juni 2025
19	Usul Penetapan NI PPPK	1 s.d. 31 Juli 2025

Keterangan:

- (*) : Sesuai dengan Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2024
- (**) : Instansi Tidak Melaksanakan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan
- (***) : Instansi Melaksanakan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan dan Mendapatkan Persetujuan Menteri PAN RB

VII. Penyerahan Dokumen Lamaran

Setelah melakukan pendaftaran secara online, pelamar menyerahkan fisik berkas lamaran untuk kepentingan verifikasi yang terdiri dari:

- Pasfoto formal terbaru berlatar belakang warna merah;
- Foto Copy Kartu Tanda Penduduk/Surat Keterangan dari Dukcapil/Bukti Identitas Kependudukan lainnya;
- Surat Pernyataan lima poin yang sudah ditandatangani dan dibubuhi materai,
- Surat Lamaran sesuai dengan persyaratan instansi dan sudah ditandatangani dan dibubuhi materai;
- Foto Copy Ijazah asli, bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib melampirkan ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
- Foto Copy Transkrip/Daftar Nilai asli, bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib melampirkan konversi nilai IPK dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
- (Khusus PPPK Teknis dan Kesehatan) Surat keterangan bekerja yang ditandatangani pimpinan unit kerja, dengan pengalaman di bidang kerja paling singkat 2 (dua) tahun untuk pelamar jabatan pelaksana/fungsional terampil/pertama atau 3 (tiga) tahun untuk pelamar jabatan fungsional muda;
- (Khusus PPPK Teknis dan Kesehatan) Surat keterangan aktif bekerja pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar yang ditandatangani pimpinan unit kerja.
Bagi pelamar yang TIDAK terdaftar database Non ASN BKN, harus mencantumkan masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus menerus;
- (Khusus PPPK Kesehatan) STR bagi tenaga kesehatan tertentu;
- (Khusus PPPK Guru)
 - Bagi pelamar Kategori Prioritas yang tidak mendapatkan formasi pada rekrutmen sebelumnya dan/atau tidak dalam status aktif mengajar menurut data Dapodik, Surat Izin dari instansi (tujuan) Pemerintah Kabupaten Ngada;
 - Bagi pelamar prioritas yang statusnya aktif mengajar di Dapodik pada Sekolah Swasta, surat izin melamar PPPK dari Ketua Yayasan;
 - Bagi pelamar yang statusnya aktif mengajar di Dapodik pada Sekolah Negeri, wajib mengunggah surat keterangan Kepala Sekolah;
 - (Khusus Disabilitas) Surat keterangan menyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh dari rumah sakit pemerintah / puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasiannya;
- Kelengkapan berkas lamaran dimasukkan dalam amplop sesuai ukuran berkas tanpa dilipat dan pada bagian luar amplop ditulis:
 - Lamaran PPPK Kabupaten Ngada tahun 2024
 - Nama Lengkap
 - No. Tlp/HP
 - Jabatan Yang dilamar
 - Kualifikasi pendidikan
 - Kode Jenis Jabatan (01 JF Guru, 02 JF Kesehatan, 03 Tenaga Teknis)
- Berkas Lamaran beserta kelengkapannya disampaikan ke alamat **Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ngada, Jalan Gaja Mada, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada**, sejak tanggal 1 Oktober s/d 21 Oktober 2024 bagi Pelamar Prioritas (Pelamar Prioritas Guru dan D-IV Bidang Pendidikan Tahun 2023), Eks THK-II, Tenaga Non ASN yang terdata dalam Pangkalan Data (Database) BKN dan 1 s/d 30 November 2024 bagi Pelamar Non ASN yang aktif bekerja di Instansi Pemerintah (Termasuk Lulusan PPG untuk Formasi Guru di Instansi Pemerintah);

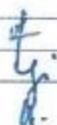
VIII. Lain-Lain

Beberapa hal yang menjadi perhatian:

- 1) Panitia tidak mengadakan surat menyurat dan tidak memungut biaya selama proses seleksi;
- 2) Biaya transportasi dan akomodasi selama proses seleksi menjadi tanggung jawab pelamar;
- 3) Pendaftaran yang dilakukan diluar waktu yang telah ditentukan dinyatakan tidak berlaku;
- 4) Kelulusan Peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngada atau dari pihak lain, maka hal tersebut adalah tindak penipuan dan kepada peserta, keluarga maupun pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- 5) Bagi pelamar yang memberikan keterangan tidak benar/palsu pada saat pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi CPPPK/PPPK, Pemerintah Kabupaten Ngada berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai CPPPK/PPPK;
- 6) Bagi pelamar yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada seleksi administrasi, diberikan waktu sanggah maksimal 3 (tiga) hari pasca pengumuman hasil seleksi administrasi dan Panitia Seleksi CPNS Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ngada diberikan waktu maksimal 7 (tujuh) hari untuk memverifikasi kembali kesesuaian persyaratan dengan dokumen yang diunggah pelamar sampai dengan penetapan keputusan sanggah;
- 7) Informasi terkait pelaksanaan seleksi CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngada Tahun 2024 dapat dilihat pada laman <https://sscasan.bkn.go.id> dan <https://portlangadakab.go.id>, serta dapat menghubungi melalui:WA atau SMS ke nomor 082144934605 (Krispin),081236753420 (Tilda), 085230019594 (Runny), 08122666683 (Nur), pada setiap hari kerja Senin s/d Jumat pukul 08.00 s/d 15.00 WIB.
- 8) Pelamar disarankan untuk tetap memantau informasi pada website sesuai angka 7 (tujuh) untuk melihat pengumuman - pengumuman penting lainnya serta waktu dan tempat pelaksanaan seleksi;
- 9) Pengaduan dan Pertanyaan melalui e-mail : bkpsdmkabupatenngada@gmail.com
- 10) Keputusan panitia bersifat MUTLAK dan tidak dapat diganggu gugat;

Demikian Pengumuman atas perhatian disampaikan terima kasih.

**BAJAWA, 1 OKTOBER 2024**
Pjs. BUPATI NGADA
Dra. HILDEGARDIS BRIA SERAN
Paraf Koordinasi

Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala BKPSDM	
Kabid Perencanaan Pengadaan, Mutasi dan Dokumentasi	

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara Regional X Denpasar di Denpasar.

Lampiran I

Pengumuman Bupati Ngada Nomor: 813/BKPSDM/18/10/2024

Contoh Surat Lamaran (DIKETIK)

BAJAWA,.....2024

NO :
LAMPIRAN : 1 (SATU) EXEMPLAR
PERIHAL : LAMARAN UNTUK MENGIKUTI SELEKSI
PENERIMAAN CPPPK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2024

DENGAN HORMAT,

SESUAI PERIHAL SURAT TERSEBUT DIATAS, SAYA YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH
INI:

NAMA :
TTL :
PENDIDIKAN :
JENIS KELAMIN :
AGAMA :
ALAMAT :
NOMOT TLP/HP :
ALAMAT E-MAIL :

DENGAN INI MENGAJUKAN PERMOHONAN KEPADA BAPAK BUPATI NGADA, KIRANYA SAYA
DAPAT DITERIMA UNTUK MENGIKUTI SELEKSI PENERIMAAN CPPPK KABUPATEN NGADA
TAHUN ANGGARAN 2024 DALAM RANGKA MENGISI
FORMASI/JABATAN.....(DIISI NAMA JABATAN YANG DILAMAR), PADA
UNIT/SATUAN KERJA.....(DIISI UNIT PENEMPATAN) DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN NGADA.

SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN, BERSAMA INI SAYA LAMPIRKAN KELENGKAPAN BERKAS
ADMINISTRASI SEBAGAI BERIKUT:

- 1) PASFOTO FORMAL TERBARU BERLATAR BELAKANG BERWARNA MERAH;
- 2) KARTU TANDA PENDUDUK/ SURAT KETERANGAN DARI DUKCAPIL/ BUKTI IDENTITAS
KEPENDUDUKAN LAINNYA YANG DIPERSYARATKAN OLEH INSTANSI;
- 3) SURAT PERNYATAAN 5 POIN SESUAI DENGAN PERSYARATAN INSTANSI YANG SUDAH
DITANDATANGANI DAN DIBUBUHI MATERAI;
- 4) SURAT LAMARAN SESUAI DENGAN PERSYARATAN INSTANSI YANG SUDAH
DITANDATANGANI DAN DIBUBUHI MATERAI;
- 5) IJAZAH ASLI;
- 6) TRANSKRIP NILAI ASLI;
- 7) SURAT TANDA REGISTRASI (STR) (BUKAN INTERSHIP) BAGI PELAMAR PADA FORMASI
TENAGA KESEHATAN;
- 8) SURAT KETERANGAN DOKTER RUMAH SAKIT PEMERINTAH YANG MENERANGKAN
JENIS DAN DERAJAT KEDISABILITAS (BAGI PENYANDANG DISABILITAS)

DEMIKIAN PERMOHONAN INI SAYA SAMPAIKAN UNTUK DIPERTIMBANGKAN DAN ATAS
PERHATIAN BAPAK DISAMPAIKAN TERIMA KASIH.

Pemohon,

Meterai 10000

Nama

Lampiran II

Pengumuman Bupati Ngada Nomor: 813/BKPSDM/18/10/2024

Surat Pernyataan **DIKETIK**

SURAT PERNYATAAN

YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI :

NAMA :

AGAMA :

ALAMAT :

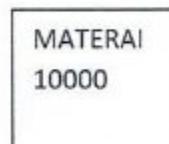
DENGAN INI MENYATAKAN DENGAN SESUNGGUHNYA, BAHWA SAYA:

1. TIDAK PERNAH DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG SUDAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA DENGAN PIDANA PENJARA 2 (DUA) TAHUN ATAU LEBIH;
2. TIDAK PERNAH DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI ATAU TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI CALON PNS ATAU PNS, CALON PPPK ATAU PPPK, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ATAU DIBERHENTIKAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI SWASTA (TERMASUK PEGAWAI BADAN USAHA MILIK NEGARA ATAU BADAN USAHA MILIK DAERAH);
3. TIDAK BERKEDUDUKAN SEBAGAI CALON PNS, PNS, CALON PPPK, PPPK, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ATAU ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA;
4. TIDAK MENJADI ANGGOTA ATAU PENGURUS PARTAI POLITIK ATAU TERLIBAT POLITIK PRAKTIS;
5. BERSEDIA DITEMPATKAN DI SELURUH WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA ATAU NEGARA LAIN YANG DITENTUKAN OLEH INSTANSI PEMERINTAH.

DEMIKIAN PERNYATAAN INI SAYA BUAT DENGAN SESUNGGUHNYA, DAN SAYA BERSEDIA DITUNTUT DI PENGADILAN SERTA BERSEDIA MENERIMA SEGALA TINDAKAN YANG DIAMBIL OLEH INSTANSI PEMERINTAH, APABILA DI KEMUDIAN HARI TERBUKTI PERNYATAAN SAYA INI TIDAK BENAR.

BAJAWA,2024

YANG MEMBUAT PERNYATAAN



.....

KOP INSTANSI

SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA

Nomor: :

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol.Ruang :

Jabatan :

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa saudara/i :

Nama :

Tempat/Tgl Lahir :

Kualifikasi Pendidikan :

Telah bekerja pada unit kerja kantor/dinas/badan/rsud/puskesmasselama
..... Tahun Bulan terhitung mulai tanggal.....sampai dengan dan
melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi dan jenjang jabatan yang dilamar
dalam Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2024.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan saya siap bertanggung jawab atas
keabsahan surat keterangan ini.

Bajawa,,.....2024

Kepala

kantor/dinas/badan/rsud/puskesmas

ttd (cap unit Kerja)

nama lengkap

Pangkat

NIP

KOP INSTANSI
SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA

Nomor: :

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol.Ruang :

Jabatan :

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa saudara/i :

Nama :

Tempat/Tgl Lahir :

Kualifikasi Pendidikan :

Adalah tenaga non ASN yang tidak terdata dalam database BKN dan aktif bekerja pada unit kerja kantor/dinas/badan/rsud/puskesmas paling sedikit 2 (dua) Tahun secara terus menerus terhitung mulai tanggalsampai dengan dikeluarkannya surat keterangan ini dan melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi dan jenjang jabatan yang dilamar dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2024.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan saya siap bertanggung jawab atas keabsahan surat keterangan ini.

Bajawa,,.....2024

Kepala

kantor/dinas/badan/rsud/puskesmas

ttd (cap unit Kerja)

nama lengkap

Pangkat

NIP

(KHUSUS PELAMAR JF GURU)

KOP SURAT SEKOLAH
SURAT KETERANGAN AKTIF MENGAJAR
NOMOR:.....

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala Sekolah
Unit Kerja : TKN/SDN/SMPN

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Nama :
NIK :
Jabatan : Guru.....
Unit Kerja : TKN/SDN/SMPN
Instansi : Dinas Pendidikan Kab. Ngada

Yang bersangkutan benar terdaftar dan mengajar sebagai Guru pada unit kerja dimaksud.

Demikian Surat keterangan aktif mengajar ini dibuat dengan sebenar - benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat...., Tanggal.....
Kepala Sekolah
[TTD & Cap Dinas]
Nama.....
NIP:

(KHUSUS PELAMAR JF GURU)

KOP SURAT DINAS PENDIDIKAN
SURAT IZIN MENGIKUTI SELEKSI PPPK JF GURU TAHUN 2024
NOMOR:

Yth.

Ketua Panitia Seleksi Daerah Pengadaan ASN PPPK Guru
Kabupaten Ngada
di
Tempat

Sehubungan dengan prasyarat surat izin dari kepala instansi pada pelaksanaan Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana diatur pada Diktum keenam KepmenPAN-RB Nomor: 348 Tahun 2024, maka saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngada

memberikan izin kepada:

Nama :
NIK :
Kategori Prioritas :

- Pelamar Prioritas yang sudah tidak terdata aktif di Dapodik
- Pelamar Prioritas mutasi dari luar instansi

Instansi sebelumnya: Prov./Kab./Kota(jika pelamar mutasi dari luar instansi) untuk mengikuti seleksi ASN PPPK Guru sebagai pelamar prioritas tahun 2024 dan akan mematuhi segala ketentuan yang berlaku.

Demikian surat izin ini dibuat dengan sebenar - benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat...., Tanggal.....
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Ngada
[TTD & Cap Dinas]
Nama.....
NIP:



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 329 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA
DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kapasitas organisasi, dan mempercepat pencapaian tujuan strategis nasional dipandang perlu menambah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Instansi Pemerintah;
- b. bahwa dalam upaya untuk penyelesaian penataan non-ASN di Instansi Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6264);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 404);

8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 173 Tahun 2024 tentang Panduan Penyusunan Rincian Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2024; dan
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 290 Tahun 2024 tentang Kebutuhan Nasional Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024.

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Keuangan Nomor: S-250/MK.02/2024 tanggal 18 Maret 2024;
 2. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 7612/B-BP.02.01/SD/K/2023 tanggal 31 Juli 2023;
 3. Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor: PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024.
 4. Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor: 1311/B.B1/HK.04.01/2024 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik Dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Instansi Pemerintah dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Kualifikasi pendidikan dan syarat jabatan bagi Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan pada Instansi Pemerintah merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor: PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024.
- KETIGA : Kualifikasi pendidikan dan syarat jabatan bagi Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Pemerintah merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor: 1311/B.B1/HK.04.01/2024 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik Dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2024.
- KEEMPAT : Pelaksanaan pengisian penetapan kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja tersebut, dilakukan oleh masing-masing Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pemerintah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing Instansi Pemerintah.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 2 Agustus 2024

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,



ABDULLAH AZWAR ANAS

RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB. NGADA
 TAHUN ANGGARAN 2024

NO	JABATAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
A.	GURU	205	
1.	GURU AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	4	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.	GURU AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KATOLIK	17	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3.	GURU AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KRISTEN	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4.	GURU AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA	6	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
5.	GURU AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS	16	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
6.	GURU AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING	15	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
7.	GURU AHLI PERTAMA - GURU IPA	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
8.	GURU AHLI PERTAMA - GURU IPS	10	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
9.	GURU AHLI PERTAMA - GURU KELAS-SD	54	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
10.	GURU AHLI PERTAMA - GURU KELAS-TK	19	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
11.	GURU AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
12.	GURU AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	7	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
13.	GURU AHLI PERTAMA - GURU PPKN	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
14.	GURU AHLI PERTAMA - GURU PRAKARYA DAN KEWIRUSAHAAN	7	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
15.	GURU AHLI PERTAMA - GURU SENI BUDAYA	20	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
16.	GURU AHLI PERTAMA - GURU TIK	26	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



panrb

NO	JABATAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
B.	TENAGA KESEHATAN	300	
1.	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	2	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS RIUNG
2.	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS NATA RANDANG
3.	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS MANGULEWA
4.	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS RAWANGKALO
5.	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAJAWA ADMINISTRATOR KESEHATAN
6.	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS LENGKOSAMBI
7.	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	3	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN
8.	APOTEKER AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS NATA RANDANG
9.	APOTEKER AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SURISINA
10.	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS RADABATA
11.	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	2	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS LENGKOSAMBI
12.	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS ULUWAE RAYA
13.	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	2	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAJAWA ASISTEN APOTEKER
14.	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS MARONGGELA
15.	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SOA
16.	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS WATUMANU
17.	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS WOLOWIO
18.	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS WAEPANA
19.	BIDAN AHLI PERTAMA	3	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS MANGULEWA
20.	BIDAN AHLI PERTAMA	2	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS RADABATA
21.	BIDAN AHLI PERTAMA	3	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KOTA
22.	BIDAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS LENGKOSAMBI
23.	BIDAN AHLI PERTAMA	2	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS MARONGGELA
24.	BIDAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS INERIE
25.	BIDAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS BOBA
26.	BIDAN AHLI PERTAMA	5	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS INELIKA RAYA
27.	BIDAN AHLI PERTAMA	2	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS LINDI
28.	BIDAN AHLI PERTAMA	2	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS AIMERE
29.	BIDAN AHLI PERTAMA	10	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAJAWA BIDAN
30.	BIDAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS WATU KAPU
31.	BIDAN AHLI PERTAMA	2	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS LANGA
32.	BIDAN AHLI PERTAMA	3	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS WOLOWIO
33.	BIDAN AHLI PERTAMA	3	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS RAWANGKALO
34.	BIDAN AHLI PERTAMA	2	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SURISINA
35.	BIDAN AHLI PERTAMA	4	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KOELODA
36.	BIDAN AHLI PERTAMA	2	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS LADJA
37.	BIDAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS NATA RANDANG
38.	BIDAN AHLI PERTAMA	5	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS ULUWAE RAYA
39.	BIDAN AHLI PERTAMA	2	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS

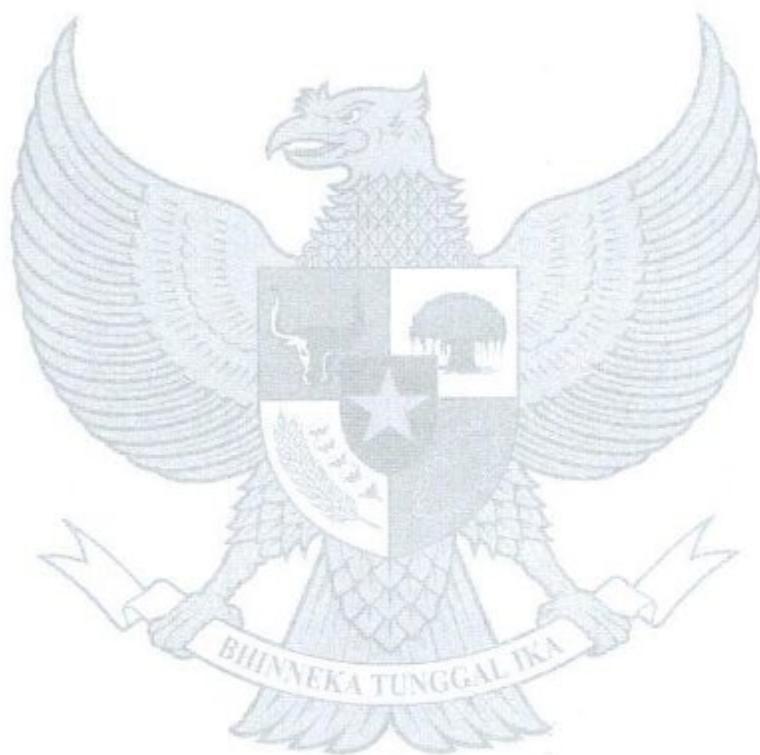
NO	JABATAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
			WAEPANA
40.	BIDAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KOELODA
41.	BIDAN TERAMPIL	5	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAJAWA BIDAN
42.	BIDAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS NATA RANDANG
43.	BIDAN TERAMPIL	2	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SOA
44.	BIDAN TERAMPIL	3	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS LINDI
45.	BIDAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS MARONGGELA
46.	BIDAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS LENGKOSAMBI
47.	BIDAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS WATUMANU
48.	BIDAN TERAMPIL	2	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS WAEPANA
49.	BIDAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS RADABATA
50.	BIDAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS INELIKA RAYA
51.	BIDAN TERAMPIL	2	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS MANGULEWA
52.	BIDAN TERAMPIL	4	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS RIUNG
53.	BIDAN TERAMPIL	2	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS LADJA
54.	BIDAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS ULUWAE RAYA
55.	BIDAN TERAMPIL	2	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS WOLOWIO
56.	BIDAN TERAMPIL	2	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS LANGA
57.	BIDAN TERAMPIL	2	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS DONA
58.	BIDAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS WATU KAPU
59.	BIDAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS AIMERE
60.	BIDAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KOTA
61.	BIDAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SURISINA
62.	BIDAN TERAMPIL	2	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS RAWANGKALO
63.	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAJAWA DOKTER
64.	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS BEDAH (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAJAWA DOKTER
65.	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAJAWA DOKTER
66.	EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS INERIE
67.	EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS RADABATA
68.	EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SURISINA
69.	EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS WOLOWIO
70.	EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS ULUWAE RAYA
71.	EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS AIMERE
72.	FISIOTERAPIS AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS RIUNG
73.	NUTRISIONIS AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS NATA RANDANG
74.	NUTRISIONIS AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS ULUWAE RAYA
75.	NUTRISIONIS AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS AIMERE
76.	NUTRISIONIS AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS MANGULEWA
77.	NUTRISIONIS AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAJAWA NUTRISIONIS

NO	JABATAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
78.	NUTRISIONIS AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS LADJA
79.	NUTRISIONIS TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS RADABATA
80.	NUTRISIONIS TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS RAWANGKALO
81.	NUTRISIONIS TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SURISINA
82.	NUTRISIONIS TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS INELIKA RAYA
83.	NUTRISIONIS TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KOTA
84.	NUTRISIONIS TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS WATUMANU
85.	PENATA ANESTESI AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAJAWA PENATA ANESTESI
86.	PERAWAT AHLI PERTAMA	10	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAJAWA PERAWAT
87.	PERAWAT AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS LADJA
88.	PERAWAT AHLI PERTAMA	2	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS LANGA
89.	PERAWAT AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS INELIKA RAYA
90.	PERAWAT AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS BOBA
91.	PERAWAT AHLI PERTAMA	2	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS RADABATA
92.	PERAWAT AHLI PERTAMA	2	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS NATA RANDANG
93.	PERAWAT AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS LENGKOSAMBI
94.	PERAWAT AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS WATU KAPU
95.	PERAWAT AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS MARONGGELA
96.	PERAWAT AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS MANGULEWA
97.	PERAWAT AHLI PERTAMA	2	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KOELODA
98.	PERAWAT AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS RIUNG
99.	PERAWAT AHLI PERTAMA	2	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS INERIE
100.	PERAWAT AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS AIMERE
101.	PERAWAT AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SOA
102.	PERAWAT AHLI PERTAMA	2	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS WOLOWIO
103.	PERAWAT AHLI PERTAMA	2	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KOTA
104.	PERAWAT AHLI PERTAMA	3	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS DONA
105.	PERAWAT AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS WATUMANU
106.	PERAWAT AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SURISINA
107.	PERAWAT AHLI PERTAMA	4	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS RAWANGKALO
108.	PERAWAT AHLI PERTAMA	2	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS WAEPANA
109.	PERAWAT AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS ULUWAE RAYA
110.	PERAWAT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KOTA
111.	PERAWAT TERAMPIL	2	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS INERIE
112.	PERAWAT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS MARONGGELA
113.	PERAWAT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS LINDI
114.	PERAWAT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS INELIKA RAYA
115.	PERAWAT TERAMPIL	2	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS MANGULEWA
116.	PERAWAT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS LENGKOSAMBI
117.	PERAWAT TERAMPIL	3	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS WOLOWIO

NO	JABATAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
118.	PERAWAT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KOELODA
119.	PERAWAT TERAMPIL	2	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS LANGA
120.	PERAWAT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SURISINA
121.	PERAWAT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS ULUWAE RAYA
122.	PERAWAT TERAMPIL	6	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAJAWA PERAWAT
123.	PERAWAT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS BOBA
124.	PERAWAT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS AIMERE
125.	PERAWAT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS WATUMANU
126.	PERAWAT TERAMPIL	2	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS NATA RANDANG
127.	PERAWAT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS LADJA
128.	PERAWAT TERAMPIL	2	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS RADABATA
129.	PERAWAT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SOA
130.	PERAWAT TERAMPIL	3	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS WAEPANA
131.	PERAWAT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS WATU KAPU
132.	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SURISINA
133.	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS INERIE
134.	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	2	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAJAWA PEREKAM MEDIS
135.	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KOELODA
136.	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS DONA
137.	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS INELIKA RAYA
138.	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS RADABATA
139.	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS MARONGGELA
140.	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SOA
141.	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS NATA RANDANG
142.	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS LANGA
143.	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KOTA
144.	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS WATU KAPU
145.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS MARONGGELA
146.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS BOBA
147.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAJAWA PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN
148.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS WATU KAPU
149.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS WATUMANU
150.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAJAWA PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN
151.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS INERIE
152.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS RIUNG
153.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	2	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS LANGA
154.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	2	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS NATA RANDANG
155.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	2	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SURISINA
156.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	2	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS RAWANGKALO

NO	JABATAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
157.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	2	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KOTA
158.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS DONA
159.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS LENGKOSAMBI
160.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS INELIKA RAYA
161.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS ULUWAE RAYA
162.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	2	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SOA
163.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS RADABATA
164.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS WATU KAPU
165.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS MANGULEWA
166.	RADIOGRAFER TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAJAWA RADIOGRAFER
167.	TEKNISI ELEKTROMEDIS TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAJAWA TEKNISI ELEKTROMEDIS
168.	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS DONA
169.	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS RADABATA
170.	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS LINDI
171.	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS LENGKOSAMBI
172.	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	2	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS RAWANGKALO
173.	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	2	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KOTA
174.	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS INERIE
175.	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	2	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SOA
176.	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS MARONGGELA
177.	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS MANGULEWA
178.	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS WOLOWIO
179.	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS LANGA
180.	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KOTA
181.	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS AIMERE
182.	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS WATU KAPU
183.	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS LENGKOSAMBI
184.	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SURISINA
185.	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS LINDI
186.	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SOA
187.	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS RIUNG
188.	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KOELODA
189.	TERAPIS GIGI DAN MULUT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS NATA RANDANG
190.	TERAPIS GIGI DAN MULUT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SOA
191.	TERAPIS GIGI DAN MULUT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS MARONGGELA
192.	TERAPIS GIGI DAN MULUT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS RADABATA
193.	TERAPIS GIGI DAN MULUT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS LANGA
194.	TERAPIS GIGI DAN MULUT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS INERIE
195.	TERAPIS GIGI DAN MULUT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS

NO	JABATAN	ALOKASI PPK	UNIT PENEMPATAN
			SURISINA
196.	TERAPIS GIGI DAN MULUT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS WATUMANU



panrb

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
C.	TENAGA TEKNIS		600	
1.	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA KANTOR KECAMATAN SOA SEKRETARIAT KECAMATAN SOA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
2.	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	6	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN SEKRETARIAT KASUBAG.PEP & KEUANGAN, UMPEG, PERLENGKAPAN
3.	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
4.	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT ; SLTA/SMA SEDERAJAT ; SLTA ; PERSAMAAN SLTA (PAKET C)	10	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN SEKRETARIAT DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
5.	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT ; SLTA ; SLTA/SMA SEDERAJAT ; PERSAMAAN SLTA (PAKET C)	2	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SEKRETARIAT DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
6.	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA KANTOR KECAMATAN GOLEWA SELATAN SEKRETARIAT KECAMATAN GOLEWA SELATAN SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PERIKANAN SEKRETARIAT DINAS PERIKANAN SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
8.	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA ; SLTA SEDERAJAT	36	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAJAWA KEPALA BAGIAN TATA USAHA KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
9.	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA	2	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA KANTOR KECAMATAN GOLEWA BARAT SEKRETARIAT KECAMATAN GOLEWA BARAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
10.	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT ; SLTA ; SLTA/SMA SEDERAJAT ; PERSAMAAN SLTA (PAKET C)	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA INSPEKTORAT KABUPATEN NGADA SEKRETARIAT INSPEKTORAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
11.	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS LADJA
12.	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	2	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SEKRETARIAT DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
13.	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA KANTOR KECAMATAN WOLOMEZE SEKRETARIAT KECAMATAN WOLOMEZE SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
14.	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT ; SLTA ; SLTA/SMA SEDERAJAT ; PERSAMAAN SLTA (PAKET C)	5	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN NGADA SEKRETARIAT BADAN PENDAPATAN DAERAH SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
15.	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS RIUNG
16.	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA	10	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA KANTOR KECAMATAN BAJAWA SEKRETARIAT KECAMATAN BAJAWA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
17.	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS WAEPANA
18.	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
19.	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS DONA
20.	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KOTA
21.	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA SEKRETARIAT DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
22.	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA UMUM	4	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN UMUM SUB BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN, STAF AHLI DAN KEPEGAWAIAN
23.	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA SEKRETARIAT DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
24.	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA UMUM ; SLTA SEDERAJAT	3	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA SEKRETARIAT DPRD KEPALA BAGIAN TATA

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
				USAHA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
25.	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS MARONGGELA
26.	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA UMUM	2	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PARIWISATA SEKRETARIAT DINAS PARIWISATA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
27.	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT ; SLTA ; SLTA/SMA SEDERAJAT ; PERSAMAAN SLTA (PAKET C)	2	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PERHUBUNGAN SEKRETARIAT DINAS PERHUBUNGAN SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
28.	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS WATU KAPU
29.	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS NATA RANDANG
30.	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA KEJURUAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SURISINA
31.	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA KANTOR KECAMATAN JEREBUU SEKRETARIAT KECAMATAN JEREBUU SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
32.	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT ; SLTA ; SLTA/SMA SEDERAJAT ; PERSAMAAN SLTA (PAKET C)	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH SEKRETARIAT DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
33.	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	3	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SEKRETARIAT DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
34.	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT ; SLTA ; SLTA/SMA SEDERAJAT ; PERSAMAAN SLTA (PAKET C)	3	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN SEKRETARIAT DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
35.	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS RADABATA
36.	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT ; SLTA/SMA SEDERAJAT ; SLTA ; PERSAMAAN SLTA (PAKET C)	10	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP SEKRETARIAT DINAS LINGKUNGAN HIDUP SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
37.	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	2	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
38.	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	10	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERTANAHAN SEKRETARIAT DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERTANAHAN SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
39.	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT ; SLTA ; SLTA/SMA SEDERAJAT ; PERSAMAAN SLTA (PAKET C)	3	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PETERNAKAN SEKRETARIAT DINAS PETERNAKAN SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
40.	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA KANTOR KECAMATAN RIUNG SEKRETARIAT KECAMATAN RIUNG SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
41.	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA KANTOR KECAMATAN GOLEWA SEKRETARIAT KECAMATAN GOLEWA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
42.	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA	2	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA KANTOR KECAMATAN INERIE SEKRETARIAT KECAMATAN INERIE SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
43.	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA KEJURUAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS INERIE
44.	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA KEJURUAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS AIMERE
45.	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT ; SLTA ; SLTA/SMA SEDERAJAT ; PERSAMAAN SLTA (PAKET C)	5	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS SOSIAL SEKRETARIAT DINAS SOSIAL SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
46.	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
47.	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA KEJURUAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KOELODA
48.	PAMONG BELAJAR AHLI PERTAMA	S-1 PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA SATUAN PNF SKB NGADA
49.	PAMONG BELAJAR AHLI PERTAMA	S-1 PENDIDIKAN TARI	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA SATUAN PNF SKB NGADA
50.	PAMONG BELAJAR AHLI PERTAMA	S-1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA SATUAN PNF SKB NGADA
51.	PAMONG BELAJAR AHLI PERTAMA	S-1 PENDIDIKAN KOMPUTER	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA SATUAN PNF SKB NGADA
52.	PAMONG BELAJAR AHLI PERTAMA	S-1 PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA SATUAN PNF SKB NGADA
53.	PAMONG BELAJAR AHLI PERTAMA	S-1 PENDIDIKAN FISIKA ; S-1 PENDIDIKAN BIOLOGI ; S-1 PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA SATUAN PNF SKB NGADA

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
		ALAM ; S-1 PENDIDIKAN KIMIA ; S-1 PENDIDIKAN MATEMATIKA		
54.	PAMONG BELAJAR AHLI PERTAMA	S-1 PENDIDIKAN JASMANI	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA SATUAN PNF SKB NGADA
55.	PAMONG BELAJAR AHLI PERTAMA	S-1 PENDIDIKAN SENI RUPA ; S-1 PENDIDIKAN NONFORMAL ATAU PENDIDIKAN MASYARAKAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA SATUAN PNF SKB NGADA
56.	PAMONG BELAJAR AHLI PERTAMA	S-1 PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA SATUAN PNF SKB NGADA
57.	PAMONG BELAJAR AHLI PERTAMA	S-1 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA SATUAN PNF SKB NGADA
58.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 ILMU SOSIATRI	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA KANTOR KECAMATAN GOLEWA BARAT SEKRETARIAT KECAMATAN GOLEWA BARAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
59.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 PENDIDIKAN BIOLOGI	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UPTD SD INPRES WUE
60.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 KESEHATAN MASYARAKAT ; S-1 SOSIATRI	2	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH SEKRETARIAT DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
61.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 PGSD	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA SEKRETARIAT DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
62.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 TEKNIK INFORMATIKA	2	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA KANTOR KECAMATAN AIMERE SEKRETARIAT KECAMATAN AIMERE SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
63.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 PGSD ; S-1 PENDIDIKAN SEJARAH	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SMPN SATU ATAP 3 SOA
64.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 MANAJEMEN	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA KANTOR KECAMATAN GOLEWA SELATAN SEKRETARIAT KECAMATAN GOLEWA SELATAN SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
65.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 PGSD/MI	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UPTD SD INPRES WOGO
66.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 MANAJEMEN	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SMPN SATAP 2 SOA
67.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 PENDIDIKAN SEJARAH ; S-1 SEJARAH	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SDN BENA
68.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 PGSD/MI	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UPTD SD NEGERI NATARTUAK
69.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 PGSD/MI	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SDN DIZI GEDHA
70.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 ILMU SOSIAL ; S-1 PERIKANAN ; S-1 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ; S-1 KOMUNIKASI ; S-1 LOGISTIK	2	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PERIKANAN SEKRETARIAT DINAS PERIKANAN SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
71.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 PGSD/MI	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UPTD SD NEGERI LINAJAWA
72.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 SOSIATRI	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UPTD SD INPRES MULU
73.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 MANAJEMEN PERBANKAN ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 EKONOMI MANAJEMEN ; S-1 TEKNIK ELEKTRO	3	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SEKRETARIAT DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
74.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 PGSD/MI	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UPTD SD INPRES RIJUNG
75.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 ILMU FILSAFAT ; S-1 KESEHATAN MASYARAKAT ; S-1 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ; S-1 HUKUM ; S-1 KEPERAWATAN	3	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SEKRETARIAT DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
76.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 EKONOMI MANAJEMEN PERBANKAN ; S-1 KESEHATAN MASYARAKAT ; S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 LOGISTIK	2	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
77.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UPTD SD INPRES LOBOLEKE
78.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	D-IV PARIWISATA	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PARIWISATA SEKRETARIAT DINAS PARIWISATA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
79.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 EKONOMI AKUNTANSI	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SDN BOPOMA
80.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 KESEHATAN MASYARAKAT ; S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH ; S-1 MANAJEMEN	3	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SEKRETARIAT BADAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
				PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
81.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 MANAJEMEN	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
82.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 TEKNIK ELEKTRO ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 ILMU SOSIAL ; S-1 FARMASI ; S-1 PENJASKES ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 EKONOMI ; S-1 MANAJEMEN KEUANGAN ; S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	5	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN SEKRETARIAT KASUBAG.PEP & KEUANGAN, UMPEG, PERLENGKAPAN
83.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 MATEMATIKA	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SMPN SATAP 1 GOLEWA
84.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INGGRIS	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SMP NEGERI SATU ATAP I BAJAWA UTARA
85.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 MANAJEMEN	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SMP NEGERI I GOLEWA BARAT
86.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 AKUNTANSI	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS AIMERE
87.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 PEMERINTAHAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA KANTOR KECAMATAN INERIE SEKRETARIAT KECAMATAN INERIE SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
88.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 MANAJEMEN PARIWISATA	2	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN SEKRETARIAT DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
89.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 EKONOMI AKUNTANSI ; S-1 HUKUM	2	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA INSPEKTORAT KABUPATEN NGADA SEKRETARIAT INSPEKTORAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
90.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	D-IV PERPAJAKAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN NGADA SEKRETARIAT BADAN PENDAPATAN DAERAH SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
91.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 PENDIDIKAN TEOLOGI	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UPTD SD NEGERI NAMPE
92.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 MANAJEMEN	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SD INPRES BAJAWA
93.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 PERENCANA WILAYAH DAN KOTA ; S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 EKONOMI	3	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SEKRETARIAT DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
94.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 KEDOKTERAN HEWAN ; S-1 PETERNAKAN ; D-IV PENYULUH PETERNAKAN	3	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PETERNAKAN SEKRETARIAT DINAS PETERNAKAN SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
95.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 AKUNTANSI	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS LENGKOSAMBI
96.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 PSIKOLOGI ; S-1 SISTEM INFORMASI	2	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN SEKRETARIAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
97.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 HUKUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK SEKRETARIAT BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
98.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 BAHASA INGGRIS	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SMP NEGERI 2 SOA
99.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 AKUNTANSI	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA KANTOR KECAMATAN JEREBUU SEKRETARIAT KECAMATAN JEREBUU SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
100.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 AKUNTANSI	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS LINDI
101.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 MANAJEMEN	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SMP NEGERI 2 GOLEWA
102.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN ; S-1 PAUD	2	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP SEKRETARIAT DINAS LINGKUNGAN HIDUP SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
103.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 PENDIDIKAN JASMANI DAN KESEHATAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UPTD SD INPRES WATURUTU
104.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 PEMERINTAHAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SMP NEGERI 1 BAJAWA
105.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 PGSD	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TKK NEGERI ST.FRANSISKA TARAWAJA
106.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 EKONOMI	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SUB

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
107.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 EKONOMI MANAJEMEN	1	BAGIAN PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS RADABATA
108.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS ; S-1 BAHASA INGGRIS	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UPTD SD INPRES NGULUKEDHA
109.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 EKONOMI MANAJEMEN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 MANAJEMEN EKONOMI ; S-1 EKONOMI	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SMPN 2 BAJAWA UTARA
110.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 AKUNTANSI	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UPTD SD INPRES WARUWAJA
111.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 MANAJEMEN	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UPTD SD INPRES RUTOSORO
112.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 PGSD/MI	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SDN MALAWARU
113.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 PENJASORKES ; S-1 AKUNTANSI	2	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA SEKRETARIAT DINAS KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
114.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 PENDIDIKAN BIOLOGI	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UPTD SD INPRES BOBOU
115.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SMP NEGERI 3 BAJAWA
116.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 EKONOMI MANAJEMEN	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KOELODA
117.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 PENDIDIKAN FISIKA	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UPTD SD NEGERI DOKA
118.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 PGSD/MI	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UPTD SD INPRES NGEDUBHAGA
119.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 PENDIDIKAN EKONOMI	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UPTD SD INPRES MENERUDA
120.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 PGSD/MI	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UPTD SD NEGERI LIBUNIO
121.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	D-IV PERIKANAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA KANTOR KECAMATAN RIUNG SEKRETARIAT KECAMATAN RIUNG SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
122.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 PENDIDIKAN EKONOMI	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TTK NEGERI ST.MARIA TARAWALI
123.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 TEKNIK ARSITEKTUR ; S-1 TEKNIK PERTAMBANGAN ; S-1 TEKNIK SIPIL ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK GEODESI ; S-1 ILMU HUKUM ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; S-1 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT ; S-1 GEOLOGI ; S-1 TEKNIK LINGKUNGAN ; S-1 TEKNIK PENGAIRAN ; S-1 TEKNIK PLANOLOGI ; S-1 TEKNIK MESIN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 ILMU HUBUNGAN MASYARAKAT ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 PEMERINTAHAN	20	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERTANAHAN SEKRETARIAT DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERTANAHAN SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
124.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 ILMU SOSIAL DAN POLITIK ; S-1 REPRODUKSI TERNAK ; S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 MANAJEMEN BISNIS ; S-1 PETERNAKAN ; S-1 BIOLOGI ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 ILMU HUKUM ; S-1 HUKUM	5	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS SOSIAL SEKRETARIAT DINAS SOSIAL SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
125.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 TEKNIK SIPIL ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 MANAJEMEN KEUANGAN DAN PERBANKAN ; S-1 PERTANIAN ; S-1 TEKNIK PENGAIRAN ; S-1 PETERNAKAN ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 PSIKOLOGI ; S-1 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ; S-1 MATEMATIKA ; S-1 ILMU HUKUM ; S-1 HUKUM	10	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SEKRETARIAT DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
126.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 AKUNTANSI ; S-1 ADMINISTRASI BISNIS	2	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
127.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 PERTANIAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UPTD SD INPRES NEPA
128.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 EKONOMI MANAJEMEN ; S-1 FARMASI	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS RAWANGKALO
129.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 EKONOMI MANAJEMEN ; S-1 TEKNIK ELEKTRO ; S-1 TEKNIK KIMIA	4	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAJAWA KEPALA BAGIAN TATA USAHA KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
130.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 MANAJEMEN	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UPTD SD INPRES TARAWAJA
131.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 KOMUNIKASI	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SUB BAGIAN PROTOKOL

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
132.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 MANAJEMEN ; S-1 TEHNIK ELEKTRO ; S-1 ILMU SOSIAL ; S-1 PENDIDIKAN BIOLOGI ; S-1 TEKNIK KIMIA ; S-1 TEKNIK SIPIL ; S-1 KEHUTANAN ; S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN ; S-1 SOSIATRI ; S-1 PENDIDIKAN FISIKA ; S-1 MANAJEMEN KEUANGAN ; S-1 EKONOMI MANAJEMEN KEUANGAN ; S-1 PETERNAKAN ; D-IV PETERNAKAN ; S-1 PERTANIAN ; S-1 AGROTEKNOLOGI PERTANIAN ; S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN ; D-IV PENYULUH PERTANIAN LAHAN KERING ; D-IV PERTANIAN ; D-IV TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN ; D-IV AGRIBISNIS ; S-1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS	38	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN SEKRETARIAT DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
133.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 TEKNIK SIPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UPTD SD NEGERI KOELODA
134.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 TEKNIK LINGKUNGAN	3	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA KANTOR KECAMATAN BAJAWA SEKRETARIAT KECAMATAN BAJAWA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
135.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 MANAJEMEN ; S-1 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SMP NEGERI 4 GOLEWA
136.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 HUKUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
137.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 ILMU ADMINISTRASI	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SMP NEGERI 4 BAJAWA
138.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	D-IV/S-1 AKUNTANSI	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH SEKRETARIAT BADAN KEUANGAN SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
139.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 ILMU SOSIAL	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PERHUBUNGAN SEKRETARIAT DINAS PERHUBUNGAN SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
140.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 AKUNTANSI	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SMP NEGERI 1 GOLEWA
141.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 PENDIDIKAN MATEMATIKA	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SMPN 3 GOLEWA SELATAN
142.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 PENDIDIKAN MATEMATIKA	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SMPN ZEU CHRISTIAN COLLEGE
143.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 PGSD/MI	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UPTD SD INPRES KELITEI
144.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UPTD SD NEGERI MAROLIDHONG
145.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SMP NEGERI 2 RIUNG
146.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA/SMA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UPTD SD INPRES DERUGAWE
147.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA/SMA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UPTD SD INPRES KISARAGHE
148.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA/SMA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UPTD SD NEGERI BHAGAROGA
149.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA ; SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UPTD SD INPRES NGALUBERE
150.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA ; SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UPTD SD INPRES TARAWALI
151.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA/SMA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UPTD SD INPRES KELITEI
152.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SMPN 1 BAJAWA UTARA
153.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA/SMA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UPTD SD INPRES TUREKISA
154.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA/SMA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UPTD SD INPRES WAE WARU
155.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA/SMA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UPTD SD INPRES MALANUZA
156.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SMP NEGERI SATU ATAP I BAJAWA UTARA
157.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA/SMA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UPTD SD INPRES WAESIA
158.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SMP

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
				NEGERI SATU ATAP RIUNG BARAT
159.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA ; SLTA/SMA SEDERAJAT ; SLTA SEDERAJAT ; PERSAMAAN SLTA (PAKET C) ; SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	2	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SEKRETARIAT DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
160.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
161.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TKK NEGERI NGULUKEDHA
162.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA/SMA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UPTD SD NEGERI SOBO
163.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SMP NEGERI 2 AIMERE
164.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS MARONGGELA
165.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA ; SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UPTD SD NEGERI MALAKIKU
166.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA/SMA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SD INPRES BAJAWA
167.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA/SMA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UPTD SD INPRES NAGE
168.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA ; SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAJAWA KEPALA BAGIAN TATA USAHA KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
169.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA ; SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UPTD SD INPRES GEMO
170.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA/SMA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UPTD SD INPRES BOGENGA
171.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA/SMA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UPTD SD INPRES BOBOU
172.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA ; SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SD NEGERI WATUKAPU
173.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA/SMA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SD NEGERI WATUTURA
174.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA ; SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UPTD SD INPRES BOGENGA
175.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA/SMA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UPTD SD NEGERI RIOMINSI
176.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT ; SLTA	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SMP NEGERI 2 SOA
177.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA/SMA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SDN AGOWOE
178.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA/SMA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UPTD SD INPRES UTASEKO
179.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA/SMA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UPTD SD INPRES RIUNG
180.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA/SMA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UPTD SD NEGERI BOAMEZE
181.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SMP NEGERI 2 BAJAWA
182.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA ; SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UPTD SD INPRES DOLUPORE
183.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KOTA
184.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA/SMA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UPTD SD INPRES TARAWAJA
185.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA/SMA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UPTD SD NEGERI NANGAMESE
186.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA/SMA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UPTD SD INPRES NGABHEO
187.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA/SMA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UPTD SD NEGERI RADHA
188.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SMP NEGERI 3 AIMERE
189.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA/SMA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UPTD SD INPRES NIRMALA

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
190.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA/SMA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UPTD SD NEGERI MAROLIDHONG
191.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TKK NEGERI TURE INKA MENERUDA
192.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS INERIE
193.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UPTD SD NEGERI BHAGAROGA
194.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SMP NEGERI 6 BAJAWA
195.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SMP NEGERI 1 GOLEWA BARAT
196.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA/SMA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UPTD SD INPRES WARIKEO
197.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA/SMA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UPTD SD NEGERI DOKA
198.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA/SMA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UPTD SD INPRES WATURUTU
199.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SMP NEGERI 1 BAJAWA
200.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA ; SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SMP NEGERI 1 AIMERE
201.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA/SMA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SDN WATUWULA
202.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	2	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SMP SATU ATAP NEGERI 1 SOA
203.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA ; SLTA/SMA SEDERAJAT ; SLTA SEDERAJAT ; PERSAMAAN SLTA (PAKET C)	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UPTD SD INPRES NGADHUSAWU
204.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA/SMA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UPTD SD INPRES DOLUMOLO
205.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA/SMA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UPTD SD INPRES LEBIJAGA
206.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KOELODA
207.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA ; SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SMP NEGERI 1 INERIE
208.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA/SMA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UPTD SD INPRES NGEDUMEE
209.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SMP NEGERI SATU ATAP KOLOKOA
210.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA ; SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SDN LATE
211.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA/SMA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SDN RADAMASA
212.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA/SMA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UPTD SD INPRES WARUWAJA
213.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA/SMA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UPTD SD INPRES RUTOGELI
214.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA/SMA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UPTD SD INPRES ALLOWULAN
215.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA/SMA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UPTD SD INPRES AIMERE
216.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA/SMA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UPTD SD NEGERI NUNUMEO
217.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TKK NEGERI KISARAGHE
218.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA/SMA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UPTD SD INPRES NGORAMAWO
219.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA/SMA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UPTD SD INPRES WELU
220.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA/SMA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UPTD SD INPRES MALAMUDE
221.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA ; SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SMP NEGERI 1 GOLEWA
222.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SMP

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
				NEGERI SATU ATAP KURUBHOKO
223.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT ; SLTA	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SMP NEGERI SATU ATAP 1 RIUNG
224.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA/SMA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UPTD SD INPRES BEIPOSO
225.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA ; SLTA SEDERAJAT	2	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SMP NEGERI 5 BAJAWA
226.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA/SMA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UPTD SD INPRES PAUPAGA
227.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA/SMA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UPTD SD INPRES MENERUDA
228.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SMP NEGERI 4 BAJAWA
229.	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III MANAJEMEN	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SMP NEGERI 1 INERIE
230.	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III PERHOTELAN ; D-III ANALIS KESEHATAN	2	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SEKRETARIAT DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
231.	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III PEKERJA SOSIAL ; D-III MANAJEMEN PERBANKAN	2	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS SOSIAL SEKRETARIAT DINAS SOSIAL SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
232.	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III TEKNIK SIPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SMPN 4 AIMERE
233.	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III ADMINISTRASI BISNIS	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KOELODA
234.	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III MANAJEMEN	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SMP NEGERI 1 AIMERE
235.	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III MANAJEMEN	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UPTD SD INPRES GEMO
236.	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III TEKNIK ELEKTRO ; D-III TEKNIK SIPIL ; D-III TEKNIK MESIN	5	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERTANAHAN SEKRETARIAT DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERTANAHAN SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
237.	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA ; D-III TEKNIK SIPIL ; D-III PETERNAKAN ; D-III NUTRISI DAN MAKANAN TERNAK ; D-III MANAJEMEN AGRIBISNIS ; D-III KEHUTANAN ; D-III PERTANIAN ; D-III MANAJEMEN PERTANIAN LAHAN KERING ; D-III MANAJEMEN PERTANIAN	11	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN SEKRETARIAT DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
238.	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III USAHA PERJALANAN WISATA	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UPTD SD INPRES RUTOGELI
239.	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III BAHASA DAN SASTRA INGGRIS	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UPTD SD INPRES TARAWALI
240.	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III AKUNTANSI	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SD NEGERI WAJAMALA
241.	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III MANAJEMEN INFORMATIKA	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA KANTOR KECAMATAN BAJAWA UTARA SEKRETARIAT KECAMATAN BAJAWA UTARA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
242.	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III AKUNTANSI	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SMP NEGERI 5 GOLEWA
243.	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III PETERNAKAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SMPN SATAP 2 GOLEWA
244.	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III FARMASI ; D-III KEBIDANAN ; D-III KEPERAWATAN	4	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN SEKRETARIAT KASUBAG.PEP & KEUANGAN, UMPEG, PERLENGKAPAN
245.	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III MANAJEMEN PERBANKAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UPTD SD INPRES DOLUMOLO
246.	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III PGSD	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UPTD SD INPRES RUTOSORO
247.	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III TEKNIK MESIN	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH SEKRETARIAT BADAN KEUANGAN SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
248.	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III MANAJEMEN PERTANIAN LAHAN KERING	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SMP NEGERI 3 GOLEWA
249.	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III MANAJEMEN PERTANIAN LAHAN KERING	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SMP NEGERI 2 AIMERE
250.	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III MANAJEMEN INFORMATIKA ; D-III MANAJEMEN INFORMASI ; D-III MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER ; D-III	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UPTD SD INPRES NIKISIE

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
		INFORMATIKA ; D-III INFORMATIKA DAN KOMPUTER		
251.	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III SEKRETARIS	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UPTD SD NEGERI LIBUNIO
252.	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III AKUNTANSI	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SMP NEGERI SATU ATAP 1 RIUNG
253.	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III TEKNIK MESIN ; D-III KEPERAWATAN ; D-III TEKNIK ELEKTRONIKA ; D-III MANAJEMEN BISNIS	4	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN SEKRETARIAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
254.	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III PERPAJAKAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PERHUBUNGAN SEKRETARIAT DINAS PERHUBUNGAN SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
255.	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SD NEGERI WATUTURA
256.	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III KESEHATAN HEWAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UPTD SD INPRES WOGO
257.	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III PETERNAKAN ; D-III KESEHATAN HEWAN	3	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PETERNAKAN SEKRETARIAT DINAS PETERNAKAN SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
258.	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III MANAJEMEN PERTANIAN LAHAN KERING	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UPTD SD NEGERI LINAJAWA
259.	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III MANAJEMEN PEMASARAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAJAWA KEPALA BAGIAN TATA USAHA KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
260.	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III MANAJEMEN PELAYANAN RUMAH SAKIT	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS LADJA
261.	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III MANAJEMEN INFORMATIKA ; D-III MANAJEMEN INFORMASI ; D-III INFORMATIKA ; D-III INFORMATIKA DAN KOMPUTER ; D-III MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SMP NEGERI 2 RIUNG
262.	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III TEKNIK SIPIL ; D-III MANAJEMEN PERUSAHAAN	3	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SEKRETARIAT DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
263.	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III AKUNTANSI	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UPTD SD INPRES DOLUPORE
264.	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III PERBANKAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS AIMERE
265.	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	SEKOLAH DASAR UMUM	3	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PETERNAKAN SEKRETARIAT DINAS PETERNAKAN SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
266.	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	SEKOLAH DASAR UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS RAWANGKALO
267.	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	SEKOLAH DASAR UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS MANGULEWA
268.	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	SLTP	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA SEKRETARIAT BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
269.	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	2	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA KANTOR KECAMATAN BAJAWA SEKRETARIAT KECAMATAN BAJAWA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
270.	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	PERSAMAAN SD (PAKET A) ; SEKOLAH DASAR UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
271.	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	SEKOLAH DASAR UMUM ; PERSAMAAN SD (PAKET A)	4	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERTANAHAN SEKRETARIAT DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERTANAHAN SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
272.	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	SEKOLAH DASAR UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS BOBA
273.	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	PERSAMAAN SD (PAKET A) ; SEKOLAH DASAR UMUM	2	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SEKRETARIAT DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
274.	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	PERSAMAAN SD (PAKET A) ; SEKOLAH DASAR UMUM	7	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAJAWA KEPALA BAGIAN TATA USAHA KEPALA SUB BAGIAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
				UMUM DAN KEPEGAWAIAN
275.	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	SLTP	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA KANTOR KECAMATAN JEREBUU SEKRETARIAT KECAMATAN JEREBUU SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
276.	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	PERSAMAAN SD (PAKET A) ; SEKOLAH DASAR UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA SEKRETARIAT DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
277.	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	PERSAMAAN SD (PAKET A) ; SEKOLAH DASAR UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN UMUM SUB BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN, STAF AHLI DAN KEPEGAWAIAN
278.	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	SLTP	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SDN WOKOPEZI
279.	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	SEKOLAH DASAR UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KOELODA
280.	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	PERSAMAAN SD (PAKET A) ; SEKOLAH DASAR UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS LANGA
281.	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	SLTP	2	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA SEKRETARIAT DPRD KEPALA BAGIAN TATA USAHA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
282.	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	SEKOLAH DASAR UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS WAEPANA
283.	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	SEKOLAH DASAR UMUM	2	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN SEKRETARIAT DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
284.	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	SLTP/SMP SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA KANTOR KECAMATAN AIMERE SEKRETARIAT KECAMATAN AIMERE SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
285.	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	PERSAMAAN SD (PAKET A) ; SEKOLAH DASAR UMUM	5	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS SOSIAL SEKRETARIAT DINAS SOSIAL SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
286.	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	SLTP	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK SEKRETARIAT BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
287.	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	SLTP	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA KANTOR KECAMATAN RIUNG BARAT SEKRETARIAT KECAMATAN RIUNG BARAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
288.	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	SLTP	3	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
289.	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	SEKOLAH DASAR UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS MARONGGELA
290.	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	SEKOLAH DASAR UMUM ; PERSAMAAN SD (PAKET A)	20	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP SEKRETARIAT DINAS LINGKUNGAN HIDUP SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
291.	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	SLTP	2	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN NGADA SEKRETARIAT BADAN PENDAPATAN DAERAH SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
292.	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	SEKOLAH DASAR UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS RIUNG
293.	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	PERSAMAAN SD (PAKET A) ; SEKOLAH DASAR UMUM	3	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN SEKRETARIAT DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
294.	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	SEKOLAH DASAR UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SURISINA
295.	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	SEKOLAH DASAR UMUM ; PERSAMAAN SD (PAKET A)	2	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SEKRETARIAT DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
296.	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	SLTP ; PERSAMAAN SLTP (PAKET B)	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PERHUBUNGAN SEKRETARIAT DINAS PERHUBUNGAN SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
297.	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	PERSAMAAN SD (PAKET A) ; SEKOLAH DASAR UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS LINDI
298.	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	SEKOLAH DASAR UMUM ; PERSAMAAN SD (PAKET A)	1	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH SEKRETARIAT DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
299.	PENYULUH PERTANIAN TERAMPIL	D-III PENYULUHAN PERTANIAN ; D-III AGRIBISNIS ; D-III AGROEKOTEKNOLOGI ; D-III AGRONOMI ; D-III BUDIDAYA PERTANIAN ; D-III HAMA PENYAKIT TUMBUHAN ; D-III MEKANISASI PERTANIAN ; D-III ILMU TANAH ; D-III MANAJEMEN AGROBISNIS ; D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA LAHAN ; D-III	2	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
		TEKNIK PERTANIAN ; D-III TANAMAN PANGAN ; D-III SOSIAL EKONOMI PERTANIAN		
300.	PRANATA TRANTIBUM	PERSAMAAN SLTA (PAKET C) ; SLTA KEJURUAN ; SLTA/SMA SEDERAJAT ; SMK ; SMK TEKNIK ; SMA IPA ; SMA IPS	27	PEMERINTAH KABUPATEN NGADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SEKSI PENANGANAN GANGGUAN KENTENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM



panrb